

## **Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi**

**Armidi; Erfit; Yulmardi**

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*E-mail korespondensi: armidi\_armidi2@yahoo.com*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to analyze the development labor force participation rate, consumer price index and provincial minimum wage, and also analyze the effect of labor force participation rate and consumer price index on Jambi Province Minimum Wage. The analytical method used is descriptive analysis and quantitative analysis using secondary data. Based on the analysis it can be concluded that during the period 2000 to 2015 the average development labor force participation rate is 0.09%, the average consumer price index is -1.00%, the average provincial minimum wage is 16.77%. Simultaneously labor force participation rate and consumer price index have a significant effect on Jambi Province Minimum Wage. Partially labor force participation rate have not significant effect on Jambi Province Minimum Wage while consumer price index have a significant effect on Jambi Province Minimum Wage.*

**Keywords:** *labor force participation rate, consumer price index, provincial minimum wage.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Harga Konsumen dan Upah Minimum Provinsi serta menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa selama periode 2000 sampai 2015 rata-rata perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 0.09%, rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen sebesar -1,00% dan perkembangan Upah Minimum Provinsi sebesar 16,77%. Secara simultan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi. Secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi sedangkan Indeks Harga Konsumen berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi.

**Kata kunci:** tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks harga konsumen, upah minimum provinsi.

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangan dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat

tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008). Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya.

Penetapan UMP didasarkan pada standar biaya hidup. Namun rata-rata tingkat UMP di Indonesia masih di bawah nilai KHL, tentunya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. UMP baru memenuhi 90% dari KHL. Komponen KHL yang ditetapkan pemerintah belum dapat mewakili kebutuhan para pekerja. Pemerintah menetapkan KHL dengan 60 komponen, tetapi para pekerja menuntut KHL dengan 84 komponen.

Dalam prakteknya, KHL ini masih banyak terjadi ketidakadilan bagi pekerja. Oleh sebab itu, KHL dirasa kurang apabila digunakan sebagai dasar penetapan UMP, sehingga perlu menggunakan faktor lain yaitu TPAK. TPAK ini dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan dapat menurunkan TPAK, sehingga tingkat penawaran tenaga kerja akan meningkat. Jika penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka nilai upah akan memburuk. Selain menggunakan TPAK, IHK juga digunakan dalam penetapan nilai UMP. IHK adalah indeks perubahan biaya hidup, dengan menggunakan IHK maka pemerintah dapat mengetahui harga-harga saat ini, sehingga tingkat upah dapat disesuaikan dengan harga yang sedang terjadi.

Kristanto (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel KHL, PDRB, dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMK. Namun jika secara parsial, variabel yang berpengaruh secara signifikan dan positif hanya variabel KHL dan PDRB, sedangkan variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap penetapan nilai UMK. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Nurtiyas (2016) menunjukkan bahwa TPAK dan PDRB berpengaruh negatif terhadap UMP sedangkan Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap UMP di Pulau Jawa. Secara bersama-sama IHK, TPAK, PDRB dan Pendapatan per Kapita berpengaruh terhadap UMP.

Pada tahun 2015 Upah Minimum Provinsi Jambi sudah lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau sumatra, seperti Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp. 1.625.000 perbulan, Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp. 1.615.000 perbulan, Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 1.500.000 perbulan dan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.581.000 perbulan. Fenomena ini dimungkinkan karena pada tahun 2015 kondisi politik dan perekonomian Provinsi Jambi dalam keadaan stabil, sehingga tidak ada unsur demonstrasi dari pihak buruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi, hal ini juga dimungkinkan karena pada tahun 2015 Upah Minimum Provinsi Jambi sudah melampaui Kebutuhan Hidup Layak bagi para buruh.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis perkembangan kebutuhan hidup layak, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks harga konsumen dan upah minimum Provinsi Jambi; 2) menganalisis pengaruh kebutuhan

hidup layak, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Untuk menganalisis perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen serta upah minimum provinsi dilakukan secara deskriptif. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum provinsi dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Berikut adalah persamaan umum model regresi linier berganda :

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_t$$

dinama :

- $\ln(Y)$  : Upah Minimum Provinsi Jambi,  
 $\beta_0$  : Konstanta,  
 $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Regresi,  
 $X_1$  : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi,  
 $X_2$  : Indeks Harga Konsumen Provinsi Jambi,  
 $e_t$  : Variabel Pengganggu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Selama kurun waktu 16 tahun perkembangan TPAK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata TPAK Provinsi Jambi sebesar 0,09 persen setiap tahunnya. Adapun jumlah angka TPAK tertinggi tercatat pada tahun 2005 yaitu mencapai 68,69 persen atau berkembang sebesar 2,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67,25 persen. Selanjutnya pada tahun 2006 TPAK mengalami penurunan terbesar selama 16 tahun terakhir yaitu mencapai -6,45 persen. sedangkan angka TPAK terkecil tercatat pada tahun 2013 yaitu sebesar 62,65 persen.

Pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau sumatra, TPAK Provinsi Jambi menempati peringkat ke lima terbesar. Dimana

peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Bengkulu yang mencapai 70,67 persen dan peringkat ke dua ditempati oleh Provinsi Sumatra Selatan yang TPAK nya mencapai 68,53 persen kemudian disusul oleh Provinsi Sumatra Utara yang mencapai 67,28 persen. Sedangkan untuk TPAK terendah ditempati oleh Provinsi Riau yang TPAK nya hanya sebesar 63,22 persen.

**Tabel 1. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jambi, 2000-2015**

Tahun	TPAK (%)	Perkembangan
2000	65,65	-
2001	67,68	3,09
2002	68,00	0,47
2003	67,91	-0,13
2004	67,25	-0,97
2005	68,69	2,14
2006	64,26	-6,45
2007	65,18	1,43
2008	65,95	1,18
2009	66,65	1,06
2010	66,38	-0,41
2011	67,67	1,94
2012	65,07	-3,84
2013	62,65	-3,72
2014	65,59	4,69
2015	66,14	0,84
<b>Rata-rata</b>		<b>0,09</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Untuk skala nasional, TPAK tertinggi ditempati oleh Provinsi Papua yang mencapai 79,57 persen, disusul oleh Provinsi Bali yang mencapai 75,51 persen. Sedangkan untuk TPAK terendah ditempati oleh Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 60,34 persen. Jika dibandingkan dengan capaian TPAK Nasional, TPAK Provinsi Jambi berada di atas rata-rata nasional. Dimana TPAK nasional sebesar 65,76 persen sedangkan TPAK Provinsi Jambi sebesar 66,14 persen.

### **Perkembangan indeks harga konsumen**

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pemerintah Provinsi Jambi selalu berusaha dapat menekan inflasi pada harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Selama kurun waktu 16 tahun, perkembangan IHK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata IHK Provinsi Jambi sebesar -1,00 persen setiap tahunnya. Adapun jumlah angka IHK tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 265,46 atau berkembang sebesar 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 250,07. Kemudian pada tahun 2004 IHK Provinsi Jambi tercatat mengalami penurunan yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 114,61 atau sebesar -56,83 persen. Fenomena ini terjadi karena mulai dari tahun 2004 ke atas perhitungan IHK mencakup 283-397 jenis komoditas barang dan jasa per kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2003 ke bawah perhitungan IHK mencakup lebih sedikit komoditas barang dan jasa yaitu sebanyak 249-353 komoditas per kabupaten/kota.

**Tabel 2. Perkembangan indeks harga konsumen Provinsi Jambi tahun 2000-2015**

Tahun	IHK (%)	Perkembangan
2000	202,74	-
2001	223,64	10,31
2002	250,07	11,82
2003	265,46	6,15
2004	114,61	-56,83
2005	126,40	10,29
2006	143,31	13,38
2007	158,26	10,43
2008	136,93	-13,48
2009	115,84	-15,40
2010	123,40	6,53
2011	133,49	8,18
2012	139,12	4,22
2013	151,28	8,74
2014	120,04	-20,65
2015	121,69	1,37
<b>Rata-rata</b>		<b>-1,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

### Perkembangan upah minimum provinsi

Berdasarkan data yang sudah dilansir bahwasanya perkembangan upah minimum provinsi jambi selalu meningkat setiap tahun. Ini dikarenakan nilai kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi juga meningkat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagai lembaga independen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum tahun yang akan datang. Dewan pengupahan terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai wakil dari pengusaha, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan Pakar Praktisi dari Perguruan Tinggi yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah. Semua pihak yang berwenang bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum provinsi jambi yang berlaku pada saat tertentu dan menuntaskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum.

Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 Upah Minimum Provinsi Jambi sudah lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau sumatra, seperti Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp. 1.625.000 perbulan, Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp. 1.615.000 perbulan, Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 1.500.000 perbulan dan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.581.000 perbulan. Fenomena ini dimungkinkan karena pada tahun 2015 kondisi politik dan perekonomian Provinsi Jambi dalam keadaan stabil, sehingga tidak ada unsur demonstrasi dari pihak buruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi, hal ini juga dimungkinkan karena pada tahun 2015 Upah Minimum Provinsi Jambi sudah melampaui Kebutuhan Hidup Layak bagi para buruh.

Perkembangan UMP di Provinsi Jambi pada umumnya mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang cenderung mengalami kenaikan. Selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2015 terlihat bahwa

perkembangan kenaikan UMP yang terbesar terjadi pada tahun 2001 dan 2003, yaitu mencapai 41,62 persen dan 28,29 persen. Ini dimungkinkan karena pada tahun tersebut sudah masuk dalam era demokrasi yang memperbolehkan pihak buruh untuk berdemonstrasi demi mencapai haknya untuk mendapat upah yang layak dan dapat hidup sejahtera. Dengan ada tekanan dari pihak buruh maka Pemerintah dan Dewan Pengupahan membuat kebijakan upah minimum yang bisa jadi dinaikkan dengan melihat kenaikan kebutuhan hidup minimum/kebutuhan hidup layak, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.

**Tabel 3. Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2000-2015**

Tahun	UMP (Rupiah)	Perkembangan (%)
2000	173.000	-
2001	245.000	41,62
2002	304.000	24,08
2003	390.000	28,29
2004	425.000	8,97
2005	485.000	14,12
2006	563.000	16,08
2007	658.000	16,87
2008	724.000	10,03
2009	800.000	10,50
2010	900.000	12,50
2011	1.028.000	14,22
2012	1.142.500	11,14
2013	1.300.000	13,79
2014	1.502.230	15,56
2015	1.710.000	13,83
<b>Rata-rata</b>		<b>16,77</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

### **Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi**

Hasil estimasi regresi untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari variabel TPAK dan IHK terhadap UMP di Provinsi Jambi baik secara simultan maupun secara parsial, dengan pengambilan keputusan adalah perbandingan antara probability (p-value) dan level of significant = 5% (0.05). Berikut merupakan hasil estimasi dari persamaan regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Hasil analisis regresi linier berganda**

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	21.64214	5.522730	3.918740	0.0018
TPAK	-0.105401	0.084937	-1.240926	0.2366
IHK	-0.008145	0.002712	-3.002863	0.0102
R-squared	0.516923	F-Statistic		6.955402
Adjudted R-squared	0.442603	Prob(F-Statistic)		0.008833

***Uji asumsi klasik***

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikorelinieritas dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel TPAK sebesar 1,092829 serta variabel IHK sebesar 1,092829. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut. Oleh karena itu variabel tersebut layak digunakan untuk menduga besar kecilnya UMP yang terjadi di Provinsi Jambi.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama dari masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini digunakan metode uji *white*. diketahui Prob.Chi-Square adalah 0,0637. Oleh karena Prob.Chi-Square  $0,0637 > (0,05)$  maka dapat dikatakan dalam model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Breusch Godfrey. dapat dilihat bahwa Pro.Chi-Square adalah 0,3249. Oleh karena Pro.Chi-Square  $0,3249 > (0,05)$  maka dapat dikatakan bahwa dalam model empiris tidak terdapat permasalahan autokorelasi.

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Berra LM. Berdasarkan tabel di atas Prob.Jarque-Berra adalah sebesar 0,656189. Oleh karena Prob.Jarque-Berra  $0,656189 > (0,05)$  maka dapat dikatakan bahwa variabel pengganggu berdistribusi normal.

***Uji hipotesis***

Pengujian hipotesis secara serentak atau Uji-F digunakan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi linier berganda pada Tabel 4. menunjukkan bahwa F-Statistik sebesar 6,955402 dengan probabilitas sama dengan  $0,008833 < (\alpha = 0,05)$ . Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama TPAK dan IHK berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu UMP.

Pengujian hipotesis secara parsial atau Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen) terhadap variabel dependen (Upah Minimum Provinsi). Koefisien regresi pada setiap variabel menunjukkan pengertian sebagai berikut.

*Pertama*, Hasil estimasi menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,2366. Dengan demikian, p-value  $0,2366 > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP. Artinya tinggi dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurtiyas (2016) dan Bersales (2014) yang menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi.

*Kedua*, Hasil estimasi IHK menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,0102. Dengan demikian, p-value  $0,0102 < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui bahwa IHK berpengaruh signifikan terhadap UMP. Artinya bahwa tinggi dan rendahnya Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. Koefisien regresi variabel IHK sebesar -0,008145 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen per tahun IHK, maka akan menurunkan UMP sebesar 0,8145 persen per tahun.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurtiyas (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kenaikan rata-rata biaya hidup atau Indeks Harga Konsumen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi. Namun penelitian Bersales (2014) menunjukkan bahwa variabel Indeks Harga Konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Selama periode 2000-2015 perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami fluktuasi cenderung meningkat sedangkan Indeks Harga Konsumen mengalami fluktuasi yang cenderung menurun hal ini berbeda dengan perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Secara bersama-sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi. Secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi sedangkan Indeks Harga Konsumen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi.

### **Saran**

Dalam penelitian ini, hanya satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk itu, bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel lain seperti: PDRB, PAD, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan lain-lain agar penelitiannya dapat disempurnakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bersales, Lisa Grace. (2014), Determinant of Regional Minimum Wage in the Philippines. Statistics Journal: Philippines. School of Statistics, University of the Philippines Diliman.
- Bank Indonesia, (2016), "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jambi Triwulan IV 2015" Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
- Charysa, Noviani, Ninda, (2013), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Economics Development Analysis Journal.
- Feriyanto, N. (2014), Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia, Yatapena, Yogyakarta

- Gall, G. (1998), *The Development of the Indonesian Labour Movement International Journal of Human Resource Management*.
- Gujarati, D., (2003), *Basic Econometric*, McGraw-Hill, New York.
- Gujarati, D., N., (2010), *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1. Edisi 5. Terjemahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hardiani,H; Junaidi,J. (2011). *Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. Laporan Penelitian. Kerjasama BKKBN dengan PSK UNJA. Jakarta*
- Junaidi,J; Zulfanetti, Z; Hardiani,H. (2014). *Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*
- Junaidi, J., Zulfanetti,Z. (2016). *Analisis Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 3(3), 141-150.*
- Kistanto, Ilham, (2013), *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.*
- Mankiw, Gregory, Euston Quah, Peter Wilson, (2013), *Pengantar Ekonomi Makro, Salemba Empat, Jakarta.*
- Nurtiyas, Febrika, (2016), *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Simanjuntak, Payaman, J., (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Simanjuntak, Payaman, J., (2002), *Masalah Upah dan Jaminan Sosial, dalam Undang-undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kantor Perhubungan Internasional, Jakarta*
- Sukirno, Sadono, (2002), *Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Sumarsono, Sony, (2003), *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.*
- Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., Sumarto, S. (2003), *Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector. Bulletin of Indonesian Econommic Studies.*
- Sukirno, Sadono, (2005), *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sinaga, Tianggur, (2008), *Kebijakan Pengupahan di Indonesia, dalam Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 3 No. 2, Peneliti Madya Bidang Litbang.*
- Sidauruk, (2011), *Kebijakan Pengupahan di Indonesia; Sebuah Tinjauan Kritis dan Usulan Perubahan Menuju Upah Layak. PT. Bumi Intiama Sejahtera, Jakarta.*

Sulistiawati Rini, (2012), Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wardhono, Adhitya, (2004), Mengenal Ekonometrika, Edisi Pertama, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.